

## ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Osi Hayuni Putri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci

E-Mail: [osihayuni putri@gmail.com](mailto:osihayuni putri@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to determine: level of efficiency and effectiveness in the financial management. The object of this research is Tanjung Jabung Timur Regency with a range of research years, namely 2010-2020. The analytical tool used is the formula Efficiency and Effectiveness. Based on the results of the study show that: The ability of the government of Tanjung Jabung Timur Regency in 2010-2020 is still less efficient, it is seen from the average level of efficiency in the management of regional finances which shows 97.01% results with the criteria of Not Efficient. From the results of the effectiveness analysis shows that the average value of the effectiveness of the level of financial management in Tanjung Jabung Timur Regency in 2010-2020 is 92.49%, which is asufficiently effective criteria.*

**Keywords:** *Efficiency; Effectiveness; Regional Finance*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Objek dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan rentang tahun penelitian yaitu tahun 2010-2020. Alat analisis yang digunakan adalah rumus Efisiensi dan Efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kemampuan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 masih kurang efisien hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya yang menunjukkan hasil sebesar 97,01% yang berkriteria Kurang Efisien. Dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 sebesar 92,49% yaitu berkriteria Cukup Efektif.

**Kata Kunci:** Efisiensi; Efektivitas; Keuangan Daerah

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan (Halim:2012).

Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan jika pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai criteria utama dalam pemberian Otonomi Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pembangunan, dan pelayanan social masyarakat.

Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, maka dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonom, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah. (Mahmudi:2009).

Setelah adanya otonomi daerah, suatu daerah diharapkan mampu menggali potensi sumber keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerahnya. Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sector terutama sector public sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai dasar dalam menjalankannya. Adapun dasar-dasar hukum untuk melaksanakan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni tentang pemerintahan daerah (Revisi dari undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Pada pasal 1 ayat 6: Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada pasal 1 ayat 7: Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Kebijakan tersebut akan berdampak pada luas nya hak, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan dari pemerintah pusat. Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek yang merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan jika pemerintah pusat menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai criteria utama dalam pemberian Otonomi Daerah. Dalam era otonomi masing-masing daerah berlomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya.

Kemampuan daerah untuk tumbuh sangat ditentukan oleh berbagai factor ekonomi yang ada kalanya satu sama lain saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah kabupaten dan kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan untuk mengelola dana desentralisasi secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didaerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan objek penelitian yang menarik, dikarenakan di daerah ini sumbangan APBD nya yang cenderung meningkat diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga mampu meningkatkan otonomi dan keleluasaan daerah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban terhadap public yang merupakan *stakeholder* perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah

bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020? Berikut ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020.

**Tabel. 1 Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020**

Tahun	Pendapatan (Rp)		Belanja (Rp)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2010	602.083.041.000	661.184.042.000	736.892.538.000	626.387.720.000
2011	632.173.995.460	670.978.071.120	782.457.177.280	699.204.035.590
2012	736.807.857.762	809.559.386.684	862.692.787.600	813.070.927.040
2013	883.020.150.665.580	920.658.800.865.580	964.734.108.834.720	913.243.006.714.000
2014	896.778.077.000	932.162.230.800	1.008.024.840.000	958.897.905.510
2015	945.283.389.254.480	920.195.435.375.630	1.011.317.248.150.350	924.555.034.929.340
2016	1.071.104.197.815.510	1.091.271.329.948.805	1.130.270.040.777.170	1.064.104.883.813.000
2017	1.027.830.341.140.000	1.081.024.250.749.690	979.643.264.499.810	913.688.426.335.000
2018	1.083.172.878.144.060	1.093.500.431.867.570	1.063.263.211.063.470	996.419.709.583.600
2019	1.225.249.382.000.000	1.196.852.312.990.000	1.225.249.382.000.000	1.272.034.541.900.000
2020	1.052.605.270.000.000	1.055.213.324.670.000	1.095.361.652.000.000	905.310.084.000.000

Sumber: BPS Tanjabtim 2022

## 2. METODE

Untuk menganalisis tingkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dilakukan dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} 100\%$$

**Tabel 2. Kriteria Kinerja Efisiensi Keuangan**

Persentase (%)	Kriteria
100% keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%– 90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

Sumber: Halim (dalam Adhiantoko:2013)

Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil, dengan demikian untuk menganalisis efektivitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

**Tabel 3. Kriteria Kinerja Efektivitas Keuangan**

Persentase (%)	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber:Mahmudi(2010)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2010-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020**

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
2010	661.184.042.000	626.387.720.000	94,74	Kurang Efisien
2011	670.978.071.102	699.204.035.590	104,21	Tidak Efisien
2012	809.559.386.684	813.070.927.040	100,43	Tidak Efisien
2013	920.658.800.865.580	913.243.006.714.000	99,19	Kurang Efisien
2014	932.162.230.800	958.897.905.510	102,87	Tidak Efisien
2015	920.195.435.375.630	924.555.034.929.340	100,47	Tidak Efisien
2016	1.091.271.329.948.850	1.064.104.883.813.000	97,51	Kurang Efisien
2017	1.081.024.250.749.690	913.688.426.335.000	84,52	Cukup Efisien
2018	1.093.500.431.867.570	996.419.709.583.600	91,12	Kurang Efisien
2019	1.196.852.312.990.000	1.272.034.541.900.000	106,28	Tidak Efisien
2020	1.055.213.324.670.000	905.310.084.000.000	85,79	Cukup Efisien
<b>Jumlah</b>	<b>7.361.789.770.198.000</b>	<b>6.992.453.247.863.000</b>	<b>1.067,13</b>	
<b>Rata-Rata</b>	<b>669.253.615.472.540</b>	<b>6.3567.756.7987.540</b>	<b>97,01</b>	<b>Kurang Efisien</b>

Sumber: APBD Tanjabtim 2010-2020 (data diolah)

Dari table 4 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Dimana tingkat efisiensi terendah terjadi pada Tahun 2017 yaitu sebesar 84,52% dengan kriteria cukup efisien dan tingkat efisien tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 106,28%

dengan kriteria tidak efisien.

Secara rata-rata Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebesar 97,01% yaitu berkriteria Kurang Efisien. Anggaran Belanja sebagai output dan Realisasi Anggaran Pendapatan sebagai Input keuangan dikatakan kurang efisien apabila penggunaan anggaran realisasi belanja (*output*) sudah tidak melebihi anggaran realisasi pendapatan (*input*), jarak antara anggaran realisasi belanja dengan realisasi pendapatan tidak terlalu banyak atau terdapat sisa anggaran realisasi pendapatan.

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020**

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Target Belanja (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2010	626.387.720.000	736.892.538.000	85,00	Kurang Efektif
2011	699.204.035.590	782.457.177.280	89,36	Kurang Efektif
2012	813.070.927.040	862.692.787.600	94,25	Cukup Efektif
2013	913.243.006.714.000	964.734.108.834.720	94,66	Cukup Efektif
2014	958.897.905.510	1.008.024.840.000	95,13	Cukup Efektif
2015	924.555.034.929.340	1.011.317.248.150.350	91,42	Cukup Efektif
2016	1.064.104.883.813.000	1.130.270.040.777.170	94,15	Cukup Efektif
2017	913.688.426.335.000	979.643.264.499.810	93,27	Cukup Efektif
2018	996.419.709.583.600	1.063.263.211.063.470	93,71	Cukup Efektif
2019	1.272.034.541.900.000	1.225.249.382.000.000	103,81	Sangat Efektif
2020	905.310.084.000.000	1.095.361.652.000.000	82,64	Kurang Efektif
<b>Jumlah</b>	<b>6.992.453.247.863.000</b>	<b>7.473.228.974.668.000</b>	<b>1.017,4</b>	
<b>Rata-rata</b>	<b>635.677.567.987.540</b>	<b>679.384.452.242.540</b>	<b>92,49</b>	<b>Cukup Efektif</b>

Sumber: APBD Tanjabtim 2010-2020 (Data diolah)

Dari table 5 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 sampai 2020 mengalami fluktuasi. Dimana Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 103,81% dengan kriteria sangat efektif dan tingkat efektivitas terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 82,64% dengan kriteria kurang efektif. Secara rata-rata Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 adalah sebesar 92,49% yang berkriteria Cukup Efektif.

Hal di atas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2018 dalam pengelolaan keuangan daerahnya sudah dinilai baik tetapi belum maksimal, hal tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Realisasi Belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (target belanja). Selisih anggaran belanja di atas masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable variance*) yaitu realisasi belanja yang lebih kecil dari anggarannya. Keuangan dikatakan cukup efektif apabila Realisasi Belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan (target belanja).

#### 4. KESIMPULAN

Kemampuan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 masih kurang efisien hal tersebut dilihat dari nilai rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerahnya yang menunjukkan hasil sebesar 97,01% yang ber kriteria Kurang Efisien. Hal tersebut dikarenakan rata-rata penggunaan anggaran realisasi belanja tidak melebihi anggaran realisasi pendapatan. Sedangkan pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 cenderung stabil. Dari hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2020 sebesar 92,49% yaitu ber kriteria Cukup Efektif. Hal tersebut dikarenakan rata-rata Realisasi Belanja tidak melebihi dari Target Belanja.

#### DAFTAR REFERENSI

- Abdul, Halim, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul, Halim, 2007. Akuntansi Sektor Publik: pengelolaan keuangan daerah edisi3: salemba empat
- Hariadi, Pramono, Restianto Yanuar, Bawono, Icuk Rangga. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo, 2004 *efisiensi dan efektifitas*, penerbit Andy Jakarta
- Mahmudi. (2007), Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Nordiawan Deddy, Hertiati Ayuningtyas, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.